

Pemkab Hibahkan Tanah kepada Polres Purworejo

PURWOREJO (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo menghibahkan tanah seluas 4.400 meter persegi di Kelurahan Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip kepada Polres Purworejo. Tanah itu saat ini sudah berdiri bangunan Mapolres Purworejo. Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM menyerahkan bantuan hibah itu secara simbolis kepada Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito SH SIK MSI, bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-75, Kamis (1/7).

Agus Bastian berharap hibah tanah ini dapat bermanfaat dan bisa sebagai pusat kegiatan Polres Purworejo sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. "Seperti yang kita lihat, hibah pemkab menjadi bangunan Mapolres Purworejo, yang tentunya secara terus-menerus, sampai kapan pun akan memberi manfaat bagi masyarakat Purworejo," tutur Agus Bastian, Kamis (1/7).

Ditambahkan, peringatan HUT ke-75 Bhayangkara adalah momentum yang baik untuk introspeksi dan refleksi bagi seluruh insan Bhayangkara dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Setiap anggota Polri, akan melihat keberhasilan sebagai capaian yang harus ditingkatkan. Sebaliknya juga menyadari kelemahan dan kekurangan selama ini, untuk diperbaiki di masa yang akan datang. Polri harus terus meningkatkan pelayanan publik yang modern dan profesional, serta melakukan penegakan hukum secara transparan dan berkeadilan. Sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat. Tanpa dukungan dan sinergi kepolisian, berbagai program pemerintah, termasuk dalam penanganan pandemi, tidak akan terlaksana secara optimal. (Jas)-d



KR-Jarot Sarwosambodo

Bupati Purworejo menyerahkan sertifikat hibah kepada Kapolres Purworejo.

Penegakan Prokes Lebih Efektif

PURWOREJO (KR) - Penegakan penerapan protokol kesehatan (prokes) dinilai lebih efektif mencegah penyebaran Covid-19 dibandingkan dengan penutupan pasar setiap hari Minggu. Masih banyaknya pelanggaran prokes di Purworejo, dinilai menjadi faktor utama semakin banyaknya warga yang terinfeksi virus. Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiyabudi SIKom MSI mengatakan, menyortir kebijakan menutup pasar tradisional milik daerah dan desa setiap hari Minggu selama pemberlakuan PPKM Mikro. "Saya kira tidak efektif menahan laju persebaran Covid-19 di Kabupaten Purworejo. Pemerintah seharusnya menitikberatkan upaya penanggulangan dengan menegakkan prokes secara ketat," ujarnya kepada KR, Kamis (1/7).

Dion juga memertanyakan apakah kebijakan menutup pasar sehari setiap Minggu menjamin kasus akan menurun. "Saya rasa tidak karena hari-hari berikutnya pasar kembali ramai, kecuali ditutup penuh beberapa hari, tapi juga tidak mungkin karena dampaknya begitu besar," tuturnya. Kebijakan itu, menyebabkan terganggunya perekonomian masyarakat kecil. Apabila pemkab beralasan akan melakukan sterilisasi, penyemprotan dapat dilakukan setiap malam setelah pasar tradisional tutup. Menurutnya, masih banyak celah penegakan prokes yang dapat dilakukan pemerintah di Purworejo. Untuk memastikan penegakan aturan itu, Dion meminta pemkab menerjunkan petugas untuk mensosialisasi dan menertibkan para pelanggar prokes. (Jas)-d

IKARI dan Walubi Gelar Vaksinasi Massal

SEMARANG (KR) - Ikatan Alumni Sekolah Nasional Karangturi (IKARI) Semarang, Rabu (30/6) hingga Jumat (2/7) menggelar Vaksinasi Covid-19 di Kampus SMA Karangturi Graha Padma Semarang. Kegiatan bekerja sama dengan Walubi, RS Telogorejo dan TNI ini berhasil menyuntikkan vaksin kepada 3.000 peserta dari alumni dan masyarakat umum. Tanto Harsono, Ketua Walubi Jateng mengungkapkan tiap harinya melakukan vaksin terhadap 1000 peserta, sehingga selama 3 hari tercapai 3.000 peserta. Sementara Juliani Budiman, Ketua IKARI menjelaskan vaksin yang digunakan dalam kegiatan tersebut Vaksin Sinovac. "Yang bisa ikut vaksin adalah yang berusia 18 tahun hingga 60 tahun dengan membawa KTP dan fotokopi KTP," kata Julia.

Terpisah Harjanto Halim, Pengurus Yayasan Sekolah Karangturi berharap dengan adanya vaksinasi, Indonesia segera cepat pulih dari Covid-19. "Dengan melaksanakan vaksinasi sesuai anjuran Pemerintah, tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak semoga Indonesia segera pulih," harap Halim. Semarang mulai Sabtu (3/7) sudah menerapkan PPKM Darurat. Walikota Semarang Hendrar Prihadi sudah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimulai Sabtu (3/7) hingga Selasa (20/7). Dalam PPKM ini aktivitas pemerintahan dilakukan Work From Home (WFH) kecuali sektor pelayanan kesehatan dan beberapa yang tidak bisa dilakukan di rumah dengan diatur pembatasan. (Cha)-d



KR-Chandra AN

Petugas lakukan vaksin massal terhadap 3.000 masyarakat yang digelar IKARI bekerja sama dengan Walubi dan TNI di Semarang.

Hari Pertama PPKM Darurat Belum Ada Perubahan

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo merasa belum ada perbedaan pada hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat. Saat berkeliling sambil gowes, Sabtu (3/7) pagi, Ganjar masih menemukan banyak warga yang belum tertib, khususnya di pasar-pasar dan warung makan. Untuk itu perlu tindakan yang lebih masif untuk mengedukasi warga terkait situasi kedaruratan saat ini.

Hal ini diungkapkan Ganjar Pranowo kepada wartawan di sela-sela pantauan pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Semarang. Ganjar mengatakan belum ada perubahan apa pun. Masih dijumpai adanya keramaian seperti di pasar-pasar tradisional dan warung makan. "Saat memantau di pasar,

saya harus kembali teriak-teriak untuk menertibkan. Kepala Pasar harus menyiapkan tim jaga untuk menyampaikan itu kepada masyarakat. Kalau perlu dibuat jadwal karena ketentuannya hanya 50 persen," kata Ganjar.

Ganjar gowes dari Rumah Dinas Puri Gedeh sekitar pukul 06.00. Baru berjalan lebih kurang tiga kilometer, Ganjar sudah menghentikan laju sepeda lantaran melihat ada warga yang makan di warung tanpa menerapkan jaga jarak. Ia langsung mengingatkan warga bahwa mulai hari ini pelaksanaan PPKM Darurat sudah dimulai dan meminta pemilik warung untuk tidak melayani pembeli yang makan di tempat. Hal serupa juga ditemukan Ganjar sela-

ma gowes berkeliling Kota Semarang sehingga ia harus berulang kali berhenti dan mengingatkan warga.

"Ayo yang di warung bisa segera pulang. Biasanya kalau makan di warung pasti saling berhadapan. Pemilik (warung) mohon izin ya, tidak boleh ada yang makan di tempat, kalau dibungkus boleh. Daripada nanti didatangi sama Satpol PP dan ditutup warungnya," teriak Ganjar mengingatkan warga dan pemilik warung.

Selain warung, Ganjar juga berkeliling ke beberapa pasar untuk mengingatkan soal protokol kesehatan. Juga terkait situasi kedaruratan saat ini yaitu penulanan Covid-19 yang sangat cepat dan meningkatnya kasus Covid-19 di Jawa Tengah dalam beberapa pekan ter-

akhir.

Ganjar selalu mengingatkan agar masyarakat memakai masker, karena masker menurutnya merupakan senjata paling utama untuk mencegah penularan Covid. Gubernur minta masyarakat saling mengingatkan, karena virusnya ganas. Kalau berjualan maskernya di-

pakai, jarak diatur. Kalau tidak taat Ganjar mengancam akan menutup pasar. Melihat beberapa temuan di lapangan, Gubernur menyimpulkan itu pelaksanaan PPKM Darurat masih belum menunjukkan adanya perubahan aktivitas maupun perilaku masyarakat.

(Bdi)-d



KR-Budiono

Ganjar Pranowo (Kiri) berkeliling melihat penerapan PPKM Darurat hari pertama sembari gowes pagi.

PENERAPAN PPKM DARURAT TEKAN COVID-19

Setiap Perbatasan Masuk Jateng 'Dikunci'

SEMARANG (KR) - Polda Jateng akan menindak tegas masyarakat yang melanggar kebijakan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali. PPKM digelar selama dua pekan, 3-20 Juli 2021.

"Mulai Sabtu (3/7) kami bertindak tegas terhadap pelanggaran PPKM Darurat," tegas Kabid Humas Polda Jateng Kombes M Iqbal Al-Qudusy, Sabtu (3/7).

Iqbal menyebutkan terkait penerapan PPKM fasilitas umum akan ditutup, penggunaan transportasi juga akan dilakukan sesuai dengan persyaratan perjalanan. "Transportasi diperketat dengan surat negatif Covid-19 lengkap dengan PCR," tutur-

nya. Selain itu, kegiatan sosial budaya, olahraga semua ditutup. Tempat ibadah sementara ditutup agar beribadah di rumah masing-masing. Resepsi pernikahan dibatasi dengan protokol kesehatan ketat," ucap Iqbal.

Iqbal mengimbau agar masyarakat tetap di rumah apabila tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Jika harus ke luar rumah, warga diminta melakukan prokes secara disiplin. Wajib ber-

masker, wajib cuci tangan, wajib jaga jarak, tidak ada bergerombol, di rumah saja dan hindari mobilitas.

Ditlantis Polda Jateng dalam melaksanakan kegiatan PPKM Darurat akan melakukan 'penguncian' di beberapa titik perbatasan, seperti perbatasan dengan Jatim dan Jabar.

Direktur Lantas Polda Jateng Kombes Pol Rudy Syafruddin menyebutkan langkah penguncian itu bertujuan menekan penyebaran Covid 19 di Jateng.

"Dalam PPKM Darurat ini, akan dilakukan kegiatan dengan mengunci perbatasan masuk Jateng. Tujuannya menekan penyebaran Covid 19," tu-



KR-Karyono

Kombes M Iqbal Al-Qudusy turnya.

Selain itu, Polda Jateng akan menutup semua perbatasan yang masuk kota dan kabupaten selama PPKM Darurat berlangsung. Setidaknya ada 42 lokasi yang dilakukan penyekatan guna mengendalikan penyebaran virus korona.

Bagi warga Semarang yang akan keluar dan masuk kembali, wajib melakukan Swab Antigen dengan menunjukkan surat keterangan negatif atau positif. Ini juga berlaku bagi semua daerah kabupaten dan kota di Jateng.

Rudy Syafruddin menambahkan semua perbatasan kabupaten dan kota di Jateng, yang akan dijaga ketat seperti perbatasan Wonogiri, Sragen, Semarang, dan Kabupaten Semarang.

Kegiatan ini dilakukan untuk memecah angka Covid-19 di Jateng dan mendorong serta mensukseskan program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. (Cry)-d

Penjualan Peti Mati Naik 50 Persen

BOYOLALI (KR) - Jumlah kasus kematian pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Boyolali terus meningkat. Akibatnya, kebutuhan peti mati untuk pemakaman semakin meningkat dan pemesanan melonjak jika dibandingkan hari biasa sebelum pandemi Covid-19.

Berdasar data dari Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, jumlah kematian Covid-19 dalam sepuluh hari terakhir pada bulan Juni 2021, minimal ada 20 kasus setiap

harinya.

Adanya permintaan peti mati yang meningkat membuat para penjual peti mati menyediakan stok tambahan. Salah seorang pengusaha peti mati, Pipit Latifa mengatakan penjualan peti mati beberapa pekan terakhir mengalami peningkatan 50 persen. Dijelaskan pihaknya mampu menjual antara 20 hingga 25 buah peti mati setiap bulan saat kondisi normal.

"Penjualan peti mati meningkat mungkin sekitar 50 persen," terangnya saat ditemui di kios mi-

liknya di Dukuh Randu, Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Jumat (2/7).

Dalam sebulan ini Pipit mampu membuat 50 peti mati dan langsung diserbu pembeli untuk pemakaman pasien positif Covid-19. Sebulan bisa mengeluarkan 50 (peti mati). Peti mati yang terbuat dari kayu jati maupun kayu randu ini sudah dilengkapi dengan peralatan jenazah, komplet mulai dari kain kafan, sabun hingga payung. Satu peti mati dihargai Rp 700.000 hingga Rp 3 juta, tergantung dari kualitas bahannya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali, Kurniawan Fajar Prasetyo pada Kamis (1/7) kemarin menjelaskan bahwa kebutuhan peti mati dalam kondisi mengkhawatirkan.

"Kendala sekarang adalah peti mati yang kritis. Karena jumlah kematian tinggi maka efek domino maka peti mati kritis," ungkapnya singkat. (M-2)-d



KR-Mulyawan

Seorang karyawan sedang menyelesaikan pengerjaan peti mati.

Patuhi PPKM Darurat, MAJT Ditutup untuk Umum

SEMARANG (KR) - Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) mengambil keputusan menutup masjid dari berbagai kegiatan peribadatan dan wisata religi. Penutupan waktunya menyesuaikan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali yang berlaku mulai 3-20 Juli 2021.

"Intinya masjid ditutup untuk umum hingga 20 Juli 2021. Penutupan ini sebagai hasil rapat koordinasi PP MAJT dengan Walikota Semarang Hendrar Prihadi, usai Jumatan (2/7)," tegas Ketua PP MAJT Prof Dr KH Noor Achmad MA kepada warta-

wan, di Semarang. Keputusan menutup MAJT untuk umum, jelas Noor Achmad didampingi Sekretaris Drs KH Muhyiddin MAG, secara otomatis menganulir keputusan yang berlaku mulai 22 Juni 2021, di mana PP MAJT menetapkan kebijakan tetap membuka objek wisata religinya disertai pengetatan protokol kesehatan terhadap siapa pun yang masuk kawasan MAJT.

"Karena lahir PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali maka kita melaksanakan aturan tersebut karena derajat aturannya lebih tinggi dibandingkan SE Walikota tertanggal 22 Juni 2021. Ini arti-



KR-Chandra AN

Prof KH Noor Achmad MA nya MAJT senantiasa patuh dengan keputusan maupun kebijakan pemerintah," jelasnya. Meski begitu, untuk fasilitas conding hall di MAJT tetap dibuka karena dibolehkan

dalam PPKM, dengan catatan resepsi maksimal dihadiri 30 undangan dan tanpa prasmanan. "Pokoknya yang dilarang kita patuhi kemudian yang dibolehkan kita maksimalkan," jelasnya.

Selanjutnya, terkait dengan penyelenggaraan hewan kurban dan salat Idul Adha 1442 Hijriyah, kegiatan penyelenggaraan hewan kurban tetap dijalankan, untuk itu masyarakat tidak usah ragu. Serahkan saja hewan kurban ke MAJT yang sudah membentuk kepantiaian diketuai Dr KH Nur Khoirin MAG. Rencananya penanganan hewan kurban akan diserahkan ke Rumah Pemo-

tongan Hewan (RPH) atau ditangani dengan melibatkan orang khusus tanpa ada kerumunan.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Walikota Semarang, ada kesepakatan seminggu menjelang Idul Adha akan ada keputusan baru tentang apakah MAJT boleh menyelenggarakan salat Idul Adha atau tidak, termasuk teknis penanganan hewan kurban. "Kita tunggu saja semoga seminggu sebelum Idul Adha kondisi pandemi sudah mulai membaik sehingga kita diizinkan menyelenggarakan salat Idul Adha dengan prokes ketat," kata Noor Achmad. (Isi)-d